

PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENGELOLAKEUANGAN DAERAH

Erna Sari

Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu

Saiful

Nila Aprila

Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah staf di Biro pengelolaan keuangan yang berjumlah 52 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa kepeahaman staf di Biro Pengelolaan Keuangan terhadap penatausahaan keuangan daerah berdampak positif, bahwa semakin baik pemahaman staf di Biro Pengelolaan keuangan Daerah terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah maka semakin baik kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah. Sedangkan pemahaman sistem akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan. Hasil penelitian ini berimplikasi kepada arah pengembangan staf di Biro pengelolaan keuangan yang sebaiknya difokuskan pada pelatihan tentang penatausahaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintahan, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Kinerja.

1. PENDAHULUAN

Penerapan sistem akuntansi ini berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja dan alat kontrol dalam pengelolaan keuangan. Agar semua pelaksana keuangan daerah mampu mengelola keuangan harus memahami sistem akuntansi, oleh sebab itu pemahaman pengelola keuangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini akan menunjang pengelola keuangan daerah dalam menyajikan laporan keuangan daerah.

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi para pegawai pengelola keuangan. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator misalnya Penetapan Perda APBD dan Perda P-APBD tepat waktu, Kualitas Pendapatan diukur dengan total PAD terhadap total Pendapatan, Kualitas Belanja diukur dengan total Belanja untuk kesejahteraan masyarakat terhadap total Belanja, Tingginya prosentase realisasi APBD dan rendahnya SiLPA dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu serta indikator pokok keberhasilan adalah peningkatan Kualitas Opini BPK atas LKPD yang meningkat. Indikator-indikator lainnya kalau dijalankan dengan ketentuan yang berlaku tentunya opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Menjadi tugas Biro Pengelolaan Keuangan, Inspektorat dan seluruh SKPD dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk mengupayakan LKPD beropini WTP (Utomo, 2012)

Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan masih melalui Biro Pengelolaan Keuangan yang masih dibawah Sekretariat Daerah, belum

berstruktur SKPKD atau DPPKA atau Badan Keuangan dan Aset Daerah, namun Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Tahun 2011 dan Tahun 2012. Oleh sebab itu penelitian ini akan dilakukan pada Pengelola Keuangan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Fokus perhatian penelitian ini adalah kinerja individu pengelola keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja pengelola keuangan pada penelitian ini adalah pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan pemahaman penatausahaan keuangan daerah. Pemilihan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa Provinsi Bengkulu sampai saat ini belum membentuk SKPD sendiri sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) atau yang disebut Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pelaksanaan sebagai BUD dilakukan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Begitu kompleksnya tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu disamping sebagai pengguna anggaran, tugas utamanya adalah sebagai BUD yang memberikan pelayanan pengelolaan keuangan kepada seluruh SKPD yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu.

Sebagai BUD diharuskan memiliki sumberdaya aparatur yang benar-benar memahami sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah. Memberikan pelayanan pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh SKPD mengharuskan bagian ini untuk mempunyai aparatur yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Sekretariat Daerah Provinsi khususnya Biro Keuangan adalah sentral dalam membangun pengelolaan keuangan yang baik, untuk itu kajian tentang kondisi pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah ini perlu dilakukan. Hal ini untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman aparatur pengelola keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu di Biro keuangan tentang sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap kinerja. Tujuannya adalah untuk membuktikan secara empiris Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja pengelola keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Pengelola Keuangan Daerah

Kinerja pengelola keuangan daerah adalah prestasi kerja atau *performance* para aparatur pegawai pemerintah daerah dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan program/kegiatan yang telah ditetapkan (Mahoney et.al, 1963 dalam Ratih, 2012).

Dengan demikian, kinerja pengelola keuangan daerah adalah suatu hasil yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja aparatur/pegawai pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya seperti aturan perundangan-undangan dan aturan lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja (prestasi kerja) pengelola keuangan daerah adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang aparatur/pegawai pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Indikator kinerja pengelola keuangan pemerintah yaitu Kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, Pengawasan superior, Efektifitas biaya, Pengaruh rekan kerja (Astuti 2008). Menurut Dessler (1997) dalam Nasaruddin (2008) indikator yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan/pegawai adalah: 1) Kualitas kerja, mengacu pada pekerjaan yang telah sesuai dengan prosedur, akurasi dan marjin kesalahan, serta kecakapan menjalankan perintah atasan; 2) Kuantitas Kerja, mengacu pada jumlah produksi atau hasil kerja dengan sistem pelayanan; 3) Kehadiran dan ketetapan waktu, mengacu pada ketetapan disiplin dan

ketaatan jadwal kerja atau kehadiran sebagaimana yang telah ditugaskan; 4) Tanggungjawab kerja, mengacu pada pelayanan dan penyelesaian tugas; 5) Ketepatan waktu kerja, mengacu pada penyelesaian tugas yang sudah ditetapkan; dan 6) Kerjasama dengan dengan rekan kerja.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD merupakan sistem informasi akuntansi bagi pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem Informasi Keuangan Daerah diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pengelolaan penatausahaan keuangan oleh setiap SKPD.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Bastian, 2006). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Maulidah, 2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan ketentuan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah minimal meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi *asset*, dan prosedur akuntansi selain kas.

Penatausahaan Keuangan Daerah

Pada tahap penatausahaan keuangan daerah dilakukan penatausahaan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan, asset/kekayaan dan kewajiban daerah dengan berbagai ketentuan, prosedur, dokumen dan lainnya untuk memberikan pengelolaan yang baik terhadap keuangan daerah. Selanjutnya hasil dari penatausahaan adalah dilakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Tahap akhir adalah dilakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Penatausahaan keuangan daerah berpedoman kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang diperbaiki dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah meliputi: 1) Penatausahaan penerimaan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); 2) Penatausahaan pengeluaran pada tingkat SKPD dan pada tingkat SKPKD.

Penatausahaan penerimaan dilakukan oleh bendahara penerimaan SKPD dengan menggunakan dokumen berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Setoran (STS), surat tanda bukti pembayaran, dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Selanjutnya, bendahara penerimaan SKPD menatausahakan penerimaan tersebut ke dalam: 1) Buku Kas Umum; 2) Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan. 3) Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (Permendagri 21 tahun 2011). Bendahara penerimaan wajib membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) administratif maupun fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sementara itu, penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) baik UP, GU, dan TU maupun LS, Nota Pencairan Dana (NPD), dan bukti-bukti pengeluaran yang sah lainnya. Selanjutnya, bendahara pengeluaran SKPD menatausahakan belanja tersebut ke dalam: 1) Buku Kas Umum Pengeluaran; 2) Buku Simpanan/Bank; 3) Buku Pajak; 4) Buku Panjar; 5) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek; 6) Register SPP-UP/GU/TU/LS. Pada akhir bulan, bendahara pengeluaran membuat SPj pengeluaran administratif maupun fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

a. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Rohman (2009) menemukan bahwa implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kinerja Pemda di Jawa Tengah. Dengan kata lain semakin baik pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintahan, semakin baik kinerja Pemerintah daerah. Rajana (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kinerja penyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan mempengaruhi kinerja penyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Ratih (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Semakin baik pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah terhadap sistem akuntansi keuangan daerah akan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

b. Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah dan Kinerja Pengelola Keuangan Daerah

Ratih (2012) menemukan bahwa pemahaman terhadap penatausahaan keuangan daerah oleh pengelola keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD. Semakin baik pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah terhadap penatausahaan keuangan daerah akan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tuasikal (2007) dalam Yohanes (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman pengelolaan keuangan daerah serta terhadap kinerja SKPD di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD. Semakin baik pemahaman pengelola keuangan daerah terhadap penatausahaan keuangan daerah akan mampu meningkatkan kinerjanya yang sekaligus meningkatkan kinerja SKPD.

Rohman (2009) melakukan penelitian tentang implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern dan kinerja. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa implementasi pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja SKPD. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis:

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis:

H1 : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah

H2 : Pemahaman Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah Berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian kuantitatif dengan metode survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dapat juga disebut jenis penelitian kausal komparatif, yaitu

penelitian yang ditujukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara berbagai variabel penelitian. Sugiyono (2012) mengatakan penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Dalam suatu penelitian, setiap permasalahan yang ditemui harus dirumuskan dan dibahas jalan pemecahannya, untuk itu diperlukan suatu desain penelitian dalam pelaksanaan penelitian.

Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan (X1) dan Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah (X2), sedangkan variabel dependen adalah Kinerja Pengelolaan keuangan Daerah (Y). Berikut dijelaskan definisi dan operasionalisasi variabel yaitu:

Variabel	Indikator	Skala	Referensi
X1 Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan	- Prosedur akuntansi penerimaan kas - Prosedur akuntansi pengeluaran kas - Prosedur akuntansi aset - Prosedur akuntansi selain kas	Ordinal	Djauhari (2008)
X2 Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah	- Asas umum penatausahaan keuangan daerah - pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah - Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran	Ordinal	Ratih (2012)
Y Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kualitas kerja - Kuantitas kerja - Tanggung jawab - Ketepatan waktu dan kerjasama	Ordinal	

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh dari aparaturnya pegawai pengelola keuangan daerah pada organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Biro keuangan yang bertindak selaku BUD. Data penelitian dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparaturnya pegawai yang bekerja di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Indriantoro dan Sopomo (2002) dalam Maryati (2012) mengatakan Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi. Metode pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang menggunakan kriteria tertentu. Sampel penelitian ini adalah Staf bagian Anggaran yang bertugas menerbitkan SPD, Staf Bagian Perbendaharaan yang terlibat dalam penerbitan SP2D, Staf Kas Daerah yang bertugas memeriksa dan mengesahkan SP2D sebelum diserahkan kepada SKPD, serta Staf bagian Akuntansi yang bertugas meregister

SPJ dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemda Provinsi Bengkulu.

Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teori. Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikuantitatifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis melalui program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Setelah kuesioner terkumpul untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan sesuai dengan yang diukur dan juga konsistensi dengan data yang dikumpulkan. Dan dilakukan Uji Normalitas, Heteroskedastisitas dan Multikolinearitas.

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh variabel pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan analisis regresi linier berganda. Secara matematis, persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja pegelola keuangan daerah

a = Konstanta

X₁ = Pemahaman terhadap Sistem Akuntansi Pemerintahan

X₂ = Pemahaman terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah

β₁, β₂ = Koefisien regresi variabel bebas

e = error

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan adalah regresi yang telah sesuai. Dengan signifikan α sebesar 5%, maka keputusan yang akan diambil adalah jika signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak dan jika signifikansi > 0,05 maka H₀ diterima.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *p value* < 0,05, maka H_a diterima dan jika *p value* > 0,05, maka H_a ditolak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini validitas item pertanyaan dalam kuesioner diuji dengan menggunakan analisis *pearson correlation*. Item pertanyaan kuisisioner dinyatakan valid apabila korelasi item pertanyaan dengan rata-rata seluruh pertanyaan untuk setiap variabel menunjukkan korelasi yang signifikan (sig.< 0.05). Hasil Pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel 4.6:

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Data

No	Variabel	Pearson Correlation	Signifikan	Status
1	PSAP	.555**-.859**	0.000 – 0.000	Valid
2	PPKD	.491**-.869**	0.000 – 0.000	Valid
3	KPKD	.650**-.830**	0.000 – 0.000	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2013 (lampiran 5)

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa semua item pertanyaan kuesioner untuk variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan, pemahaman penatausahaan keuangan daerah, dan kinerja pengelola keuangan daerah semuanya valid.

Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas merupakan indikasi dari stabilitas dan konsistensi instrument atau item pertanyaan dalam mengukur variabel. Untuk mengukur reliabilitas digunakan koefisien *Cronbach Alpha* (α). Menurut Nunnally (1994) dalam Ghozali (2011) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alphanya lebih besar dari 0,70. Lihat pada tabel 4.7:

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Data

No.	Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	PSAP	0.834	Reliabel
2	PPKD	0.833	Reliabel
3	KPKD	0.837	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2013 (lampiran 6)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa semua instrument pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.8:

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas data

Variabel	Asymp Sig (2-tailed)	Keterangan
PSAP	0.013	Tidak Normal
PPKD	0.001	Tidak Normal
KPKD	0.000	Tidak Normal

Sumber : Data primer diolah, 2013 (lampiran 7)

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa semua variabel dalam penelitian yaitu pemahaman sistem akuntansi pemerintahan, pemahaman penatausahaan keuangan daerah, dan kinerja pengelola keuangan daerah memiliki nilai *Asymp Sig* kurang 0.05, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal. Namun demikian berdasarkan pada asumsi *Central Limit Theorm* (CLT), data diasumsikan terdistribusi normal apabila jumlah sampel relatif besar (lebih dari 30 observasi), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Data

Variabel	Signifikansi	Keterangan
PSAP	0.077	Bebas
PPKD	0.141	Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, 2013 (lampiran 8)

Dari tabel 4.9 terlihat bahwa untuk semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0.050, sehingga variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan, pemahaman penatausahaan keuangan daerah, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collenarity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PSAP	0.705	1.418	Bebas
PPKD	0.705	1.418	Multikolinearitas

Sumber : Data primer diolah, 2013 (lampiran 9)

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan pemahaman penatausahaan keuangan daerah, memiliki nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10, sehingga variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan pemahaman penatausahaan keuangan daerah bebas dari masalah multikolinearitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.11:

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis 1 dan 2

Variabel	Persamaan 1			Konfirmasi Hipotesis
	Nilai Koefisien	t- statistik	Sig.	
PSAP	0.230	1.321	0.192	Ditolak
PPKD	0.475	2.463	0.017	Diterima
R Square	0.247			
Adj R Square	0.217			
F	8.048			
Sig.	0.001			

Sumber : Data primer diolah, 2013 (lampiran 10)

Berdasarkan pada tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjust R Square sebesar 0,247 menunjukkan bahwa 24,7% variasi kinerja pengelola keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan pemahaman penatausahaan keuangan daerah, sedangkan sisanya 75,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini. Nilai statistik F sebesar 8.048 dengan nilai signifikansi $p = 0,001 < 0,05$ menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk dilakukan analisis.

Tabel 4.11 juga menunjukkan bahwa tingkat signifikansi koefisien pemahaman akuntansi pemerintahan adalah lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa pemahaman sistem akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis satu dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangan daerah tidak dapat didukung (**hipotesis satu ditolak**).

Disamping itu table 4.11 menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,475 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis dua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangan daerah dapat didukung (**hipotesis kedua diterima**). Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman penatausahaan keuangan daerah, semakin baik kinerja pengelola keuangan daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian ini tidak berhasil menemukan pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintahan terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa

pemahaman staf di Biro Pengelolaan Keuangan Provinsi Bengkulu terhadap sistem akuntansi pemerintahan tidak berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah Pemda Provinsi Bengkulu. Dilihat dari arah pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintahan mempunyai arah positif terhadap kinerja pengelola keuangan tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik responden yang mengembalikan kuesioner yang sebagian besar berasal dari bagian akuntansi (lihat tabel 4.1). Berdasarkan rata-rata jawaban responden kondisi pemahaman sistem akuntansi pemerintahan sebesar 76,9% pada Biro Pengelolaan Keuangan sudah terkategori baik (lihat tabel 4.5). Hanya saja masih terdapat responden yang menjawab dengan kategori cukup yaitu sebesar 13,5%, jika dibandingkan dengan kinerja pengelola keuangan daerah dengan jawaban responden baik dan sangat baik memiliki rata-rata 100%, hal ini mempunyai pengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan daerah di Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu yang tidak signifikan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa pemahaman sistem akuntansi pemerintahan akan mampu meningkatkan kinerja pengelola keuangan di Biro Pengelolaan Keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Tausikal (2007) dalam Yohanes (2008) yang menemukan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD. Juga tidak sejalan dengan Syahrída (2006) dalam Yohanes (2008) yang mengatakan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD di Provinsi Sumatera Utara. Bertentangan dengan Astuti (2008) yang menemukan sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja individu.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman staf di Biro Pengelolaan keuangan Daerah terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah maka semakin baik kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah. Hasil penelitian ini berimplikasi pada kebijakan pengembangan staf di Biro Pengelolaan Keuangan yaitu dengan cara meningkatkan kepaahaman staf dalam penatausahaan keuangan daerah. Peluang untuk meningkatkan pemahaman penatausahaan keuangan daerah masih sangat terbuka ketika masih terdapat 73,1% staf Biro Pengelolaan Keuangan yang masih memahami secara baik.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Syahrída (2006) dalam Yohanes (2008) bahwa pemahaman pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan Rohman (2009) bahwa implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern dan kinerja.

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Sistem Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan kepaahaman staf di Biro Pengelolaan Keuangan terhadap sistem akuntansi pemerintahan tidak berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah. 2) Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja pengelola keuangan daerah.

Implikasi penelitian bagi Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengembangan staf pengelola keuangan yaitu, dengan cara memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada staf pengelola keuangan khususnya dibidang Penatausahaan Keuangan Daerah seperti penatausahaan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan, asset/kekayaan dan kewajiban daerah dengan berbagai

ketentuan, prosedur, dokumen dan lain-lain. Peluang untuk meningkatkan pemahaman penatausahaan keuangan daerah masih sangat terbuka ketika masih terdapat 73,1% staf Biro Pengelolaan Keuangan yang masih memahami secara baik. Untuk Kepada staf yang ada di Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Provinsi Bengkulu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan melibatkan diri lebih jauh dalam pengembangan kompetensi kearah yang lebih baik terutama berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya terkait dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah pada Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu, Tidak mampu membuktikan hipotesis satu, mungkin disebabkan keterbatasan sampel yang banyak berasal dari bagian akuntansi dan anggaran yang memahami benar sistem akuntansi. Penulis menyadari masih terdapat kelemahan dan keterbatasan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut seperti: 1) Kuesioner ini diberikan kepada responden yang menilai diri mereka sendiri untuk sebuah penelitian yang berkaitan dengan kualitas mereka sehingga pemberian nilai yang tidak sewajarnya merupakan kemungkinan yang dapat saja terjadi. 2) Kemungkinan masih ada variabel lain yang mempengaruhi kinerja terlihat dari Adjust R Square sebesar 24,7% seperti variabel partisipasi anggaran, peran pimpinan dan lain-lain diluar dari penelitian ini.

Dari keterbatasan penelitian diatas, peneliti ingin memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Sampel Penelitian diperluas tidak hanya pada Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian selanjutnya mungkin dapat memperluas lingkup penelitian sehingga hasil penelitian lebih memungkinkan digeneralisasi secara umum. 2) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pengelola keuangan di Biro Pengelola Keuangan Sekretariat Pemerintah Provinsi Bengkulu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Astuti, Maulidah Tri, 2008. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu*, Skripsi. Brawijaya, Malang..
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor publik : Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Bodnar, George H. dan William S. Hopwood. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*: Buku 1. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.
- Djauhari, H. Nurdin, 2008. *Hubungan Antara Pendidikan-Latihan dan Masa Kerja Dengan Kinerja Pejabat Penyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam*. Tesis Program MM Unib, tidak dipublikasikan.
- Fahmi, Irham, 2011. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Alfabeta, Bandung.
- Ghozali, Imam, 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Utomo, JP, 2012. *Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Keuangan, September 2012.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta.
- Maryati, Sri, 2012. *Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu*. Tesis Program MAKSI Unib 2012, tidak dipublikasikan.
- Maulidah R; Iswahyudi YS; Deddi N, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nasaruddin, Fadliah, 2008. *Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi Pada Bank Negara Indonesia Tbk*. Jurnal Ichsan Gorontalo, Volume 3 Nomor 1. Februari-April 2008.
- Nuraeni, Y; Titi S; dan Abdul R, 2012. *Model Pengelolaan Keuangan Instansi Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 11, Nomor 1.
- Ratih, Asri Eka, 2012. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan barang Milik Daerah Terhadap Kinerja*

-
- SKPD Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*. Tesis Tidak Dipublikasikan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Rohman, Abdul, 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemda di Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 9, Nomor 1,
- Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
-, 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
-, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
-, 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Yohanes, Enho, 2008. *Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. USU, Medan.

Halaman ini sengaja dikosongkan